



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD JURAMADI ESRAM
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 184335

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 370.000.000

1. Tanah Seluas 674 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 410.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU FEROZA/JEEP Tahun 1997, HASIL SENDIRI
Rp. 55.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
220.000.000
3. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000
4. MOTOR, YAMAHA VIXON Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
5. MOBIL, NISSAN MARCH NISSAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 105.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 65.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 416.374.179

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.261.374.179



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.261.374.179

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.